



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 727);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD tahun anggaran 2026 sebesar Rp 816.827.136.109 (Delapan ratus enam belas miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 759.427.623.936 (Tujuh ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 138.321.181.936 (Seratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 70.734.939.180 (Tujuh puluh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 51.995.400.587 (Lima puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.578.283.047 (Lima miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 10.012.559.122 (Sepuluh miliar dua belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 621.096.442.000 (enam ratus dua puluh satu miliar sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 586.671.442.000 (lima ratus delapan puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 34.425.000.000 (tiga puluh empat miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. hibah;
 - b. dana darurat; dan/atau
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp.816.827.136.109 (Delapan ratus enam belas miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 693.961.780.497 (Enam ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 485.561.489.952 (Empat ratus delapan puluh lima miliar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 196.593.225.545 (Seratus sembilan puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.257.065.000 (enam miliar dua ratus lima puluh tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 5.550.000.000 (lima miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 34.762.490.447 (Tiga puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.170.204.850 (Sembilan miliar seratus tujuh puluh juta dua ratus empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 10.080.118.770 (Sepuluh miliar delapan puluh juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 13.397.923.887 (Tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.114.242.940, (Dua miliar seratus empat belas juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 87.502.865.165 (Delapan puluh tujuh miliar lima ratus dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.857.819.265 (Tujuh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 79.645.045.900 (Tujuh puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh lima juta empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 57.399.512.173, (Lima puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp 57.399.512.173, (Lima puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 57.299.512.173 (Lima puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Pasal 14

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 57.399.512.173 (Lima puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar sebesar Rp 57.399.512.173 (Lima puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam APBD tahun anggaran 2026.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2026;
- c. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2026;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2026;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2026;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota Tahun Anggaran 2026;
- j. Lampiran X : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per Jabatan Tahun Anggaran 2026;
- k. Lampiran XI : Daftar piutang daerah Tahun Anggaran 2026;
- l. Lampiran XII : Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya Tahun Anggaran 2026; dan
- m. Lampiran XIII : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain lain Tahun Anggaran 2026.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

ERNA KUNONDO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.

NIP. 19710602 200604 1 005

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (8.41/2025).



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam menyelenggarakan pembangunan selama satu tahun anggaran, yang disusun mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat dan kebijakan Pemerintah Provinsi sebagaimana yang tertuang pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yang secara keseluruhan merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan instrumen pelaksanaan strategi fiskal sekaligus sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 dan tahun kedua dari RPJMD 2025-2029 yang sedang disusun pada saat yang bersamaan. Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Belitung Timur diarahkan sesuai misi kedua dalam RPJMD 2021- 2026 yakni “Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja”, selaras dengan misi ketiga RPJMD 2025-2029 yang sama-sama dirumuskan ke arah peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu juga diarahkan sejalan dengan tema pembangunan Kabupaten Belitung Timur tahun 2026 yaitu “Pemantapan Fondasi Transformasi Pelayanan Publik dan Ekonomi Daerah Berbasis Tata Kelola Inklusif dan Berkelanjutan”.

APBD disusun untuk menampung Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, kemudian ditetapkan Dengan Peraturan Daerah. Pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Daerah juga harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. APBD juga penjabaran dalam pelaksanaan Anggaran belanja daerah yang diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam menyusun APBD juga harus berdasarkan hasil capaian pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun sebelumnya serta perkembangan asumsi-asumsi dalam Kebijakan APBD Kabupaten Belitung Timur, dalam penyusunan APBD juga harus memperhatikan standar satuan harga, asumsi ekonomi makro terhadap kemampuan fiskal daerah, sasaran dan hasil yang harus dicapai, kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, kemudian proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka memerlukan ketelitian dalam penyusunan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan.

Perkembangan pembangunan Kabupaten Belitung Timur setelah melewati satu dasawarsa sejak dibentuknya Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268), telah mengalami peningkatan yang cukup pesat baik pembangunan secara fisik maupun non fisik. Pembangunan daerah hendaknya tidak diartikan sebagai pembangunan yang hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga termasuk yang dilakukan atas prakarsa swasta dan masyarakat sendiri. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sangat esensial dan peranan pemerintah terutama haruslah sebagai fasilitator, pembina dan pengarah dalam arti seluas-luasnya.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan dalam situasi sosial ekonomi yang penuh tantangan dan peluang, baik di tingkat nasional maupun lokal. Secara nasional, perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh moderat di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, seperti dampak geopolitik dunia, volatilitas harga komoditas, serta transisi kebijakan moneter di negara maju. Di sisi lain, pemerintah pusat tengah mendorong penguatan fondasi ekonomi domestik melalui peningkatan kemandirian pangan, hilirisasi sumber daya alam, dan perluasan jaring pengaman sosial. Dunia internasional masih dibayangi ketidakpastian akibat pemulihan ekonomi pasca pandemi yang belum sepenuhnya merata, gejolak geopolitik di berbagai kawasan (seperti konflik Rusia-Ukraina, iran-israel, dan tensi dagang AS-Tiongkok), serta dampak perubahan iklim yang semakin nyata terhadap stabilitas ekonomi dan sosial. Di tengah tekanan tersebut, Indonesia dituntut untuk tetap menjaga ketahanan ekonomi, mendorong pembangunan inklusif, dan memperkuat fondasi fiskal agar mampu menghadapi tekanan eksternal dan internal secara berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan masih stabil pada kisaran 5,0%–5,2%, namun dengan sejumlah tekanan seperti melambatnya konsumsi rumah tangga dan penurunan harga komoditas ekspor unggulan seperti batu bara dan minyak sawit. Meskipun demikian, indikator fundamental ekonomi tetap relatif terjaga, seperti inflasi yang terkendali di bawah 3%, surplus neraca perdagangan, dan penguatan cadangan devisa. Namun demikian, tantangan struktural masih membayangi, seperti rendahnya daya saing

sektor industri, belum optimalnya penyerapan tenaga kerja, serta kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Dalam konteks fiskal, pemerintah menghadapi tugas besar dalam menjaga kesinambungan anggaran. Ruang fiskal semakin sempit seiring dengan penurunan rasio penerimaan terhadap PDB yang diproyeksikan hanya sekitar 11,7% hingga 12,2%. Sementara itu, kebutuhan belanja negara terus meningkat untuk mendanai program prioritas nasional, termasuk penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan strategi kebijakan fiskal yang adaptif, inovatif, dan efisien.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berkomitmen untuk menjabarkan kebijakan makro dan fiskal nasional ke dalam kebijakan pembangunan daerah yang konkret dan kontekstual. Sebagai daerah kepulauan yang mengandalkan sektor primer seperti pertambangan, perikanan, dan pariwisata, Belitung Timur dihadapkan pada tantangan penurunan harga komoditas tambang (terutama pasir timah), fluktuasi produksi perikanan tangkap, serta tekanan inflasi di sektor pangan dan energi yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Oleh karena itu, arah kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi lokal yang lebih resilien, mendukung UMKM, memperluas akses layanan dasar, dan mempercepat transformasi sektor unggulan.

Dalam beberapa tahun terakhir, kemampuan fiskal Belitung Timur mengalami tekanan seiring dengan menurunnya pendapatan transfer dari pusat serta terbatasnya potensi pendapatan asli daerah (PAD). Rasio kemandirian fiskal masih tergolong rendah, sehingga upaya optimalisasi PAD secara selektif dan strategis harus terus dilakukan tanpa membebani masyarakat. Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya beban belanja wajib dan mengikat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, yang menyisakan ruang belanja pembangunan yang relatif kecil. Maka, diperlukan kebijakan belanja yang lebih selektif, berbasis prioritas, serta berorientasi pada output dan outcome nyata yang dirasakan masyarakat.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi tonggak penting dalam mendorong reformasi belanja negara. Instruksi ini mengarahkan seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk melakukan penghematan belanja operasional, seperti perjalanan dinas, rapat, dan pengadaan barang/jasa non-prioritas, serta mengalihkan anggaran tersebut ke belanja produktif yang mendukung program strategis nasional dan pelayanan publik. Semangat efisiensi ini perlu dijadikan prinsip dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2026.

Visi pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 dalam dokumen RPJMD adalah "BELTIM NYAMAN DAN BERKEMAJUAN". Berdasarkan visi tersebut, diharapkan seluruh elemen masyarakat Belitung Timur (termasuk didalamnya unsur pemerintah daerah) lebih mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan masyarakat Belitung Timur yang INovatif, berdAya saing, MANDiri dan Berkemajuan.

Untuk mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Belitung Timur di atas, pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan, maka ditetapkan misi, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital dan kepemimpinan kolaboratif;
2. Melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas produktif, berakhlak, berbudaya, dan bahagia;
3. Menciptakan percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, kelautan, dan ekonomi kreatif, serta memperkuat kolaborasi antar pelaku pembangunan;
4. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik yang berkualitas dan memadai untuk pemerataan kesejahteraan; dan
5. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam yang bijaksana, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Upaya untuk terus melakukan perubahan dan perbaikan dalam tata pengelolaan keuangan daerah, terus dilakukan, melalui penyempurnaan berbagai regulasi di bidang keuangan daerah melalui penyediaan instrumen dan infrastruktur pendukung dalam pengimplementasian pengelolaan keuangan daerah. Tujuan yang ingin dicapai dari berbagai upaya di tingkat pemerintah daerah adalah dalam upaya untuk menciptakan sistem dan tata cara pengelolaan keuangan daerah yang semakin ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel, responsip dan demokratis.

Sistem pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, diganti dengan paket perundangan lain, diantaranya; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam perspektif teori manajemen anggaran publik (*public expenditure management*), pemberlakuan ketiga payung hukum pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat dilihat sebagai alat untuk menciptakan keterpaduan pengelolaan keuangan negara di samping memperkuat terciptanya outcome pengelolaan keuangan publik, berupa: teralokasinya sumber pembiayaan publik pada bidang dan sektor pembangunan yang strategis (*strategic allocation*), terciptanya efisiensi pengelolaan keuangan daerah (*technical efficiency*) dan terciptanya disiplin anggaran (*fiscal discipline*).

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah mengupayakan untuk melakukan sinergi kebijakan daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat tersebut melalui sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah daerah di dalam RKPD Tahun 2026 dengan tema, prioritas sebagaimana tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2026 disusun salah satunya untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang selalu mengakomodir kebutuhan masyarakat dan berupaya memaksimalkan kepuasan dalam memberikan pelayanan secara nyata dan bertanggung jawab serta memperhatikan supremasi hukum sebagai salah satu amanah reformasi penyelenggaraan pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.



KABUPATEN BELITONG TIMUR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|------------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 138.321.181.936,00 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 70.734.939.180,00 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 51.995.400.587,00 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.578.283.047,00 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 10.012.559.122,00 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 621.096.442.000,00 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 586.671.442.000,00 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 34.425.000.000,00 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 10.000.000,00 |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 10.000.000,00 |
| | Jumlah Pendapatan | 759.427.623.936,00 |
| 5 | BELANJA DAERAH | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 693.961.780.497,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 485.561.489.952,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 196.593.225.545,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 6.257.065.000,00 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 5.550.000.000,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 34.762.490.447,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 9.170.204.850,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 10.080.118.770,00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 13.397.923.887,00 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 2.114.242.940,00 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 600.000.000,00 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 600.000.000,00 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 87.502.865.165,00 |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 7.857.819.265,00 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 79.645.045.900,00 |
| | Jumlah Belanja | 816.827.136.109,00 |
| | Total Surplus/(Defisit) | -57.399.512.173,00 |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|--------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 57.399.512.173,00 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 57.299.512.173,00 |
| 6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 100.000.000,00 |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 57.399.512.173,00 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 |
| | Pembiayaan Netto | 57.399.512.173,00 |
| 6.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00 |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

KAMARUDIN MUTEN



KABUPATEN BELITUNG TIMUR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2026

| Kode | | | Urusan Pemerintah Daerah | Pendapatan | Belanja | | | | |
|------|----|------------------------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------|--------------------|
| | | | | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 49.382.875.029,0 0 | 450.233.482.881,00 | 33.159.770.896,00 | 0,00 | 0,00 | 483.393.253.777,00 |
| 1 | 01 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 0,00 | 206.241.910.048,00 | 8.972.277.340,00 | 0,00 | 0,00 | 215.214.187.388,00 |
| 1 | 01 | 1.01.4.01.0.00.01.0000 | Dinas Pendidikan | 0,00 | 206.241.910.048,00 | 8.972.277.340,00 | 0,00 | 0,00 | 215.214.187.388,00 |
| 1 | 02 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 48.219.975.029,0 0 | 201.426.123.043,00 | 10.436.773.550,00 | 0,00 | 0,00 | 211.862.896.593,00 |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.03.0000 | Dinas Kesehatan | 0,00 | 142.691.162.461,00 | 1.331.081.400,00 | 0,00 | 0,00 | 144.022.243.861,00 |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.03.0001 | RSUD Muhammad Zein | 37.640.000.000,0 0 | 41.809.455.600,00 | 8.285.297.400,00 | 0,00 | 0,00 | 50.094.753.000,00 |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.03.0002 | UPT Puskesmas Manggar | 2.700.000.000,00 | 3.332.407.250,00 | 246.175.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.578.583.000,00 |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.03.0003 | UPT Puskesmas Mengkubang | 1.167.748.050,00 | 2.217.080.953,00 | 94.675.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.311.756.253,00 |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.03.0004 | UPT Puskesmas Gantung | 2.586.812.978,00 | 3.823.903.978,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.923.903.978,00 |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.03.0005 | UPT Puskesmas Kelapa Kampit | 2.093.272.145,00 | 2.898.994.045,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.098.994.045,00 |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.03.0006 | UPT Puskesmas Simpang Pesak | 805.800.000,00 | 1.598.969.000,00 | 61.766.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660.735.700,00 |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.03.0007 | UPT Puskesmas Renggiang | 536.340.000,00 | 1.680.161.100,00 | 53.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.733.561.100,00 |
| 1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.03.0008 | UPT Puskesmas Dendang | 690.001.856,00 | 1.373.988.656,00 | 64.377.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.438.365.656,00 |
| 1 | 03 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.162.900.000,00 | 15.229.833.098,00 | 10.829.452.946,00 | 0,00 | 0,00 | 26.059.286.044,00 |
| 1 | 03 | 1.03.2.10.1.04.01.0000 | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 1.162.900.000,00 | 15.229.833.098,00 | 10.829.452.946,00 | 0,00 | 0,00 | 26.059.286.044,00 |
| 1 | 04 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0,00 | 7.012.427.400,00 | 2.359.907.360,00 | 0,00 | 0,00 | 9.372.334.760,00 |

| Kode | | | Urusan Pemerintah Daerah | Pendapatan | Belanja | | | | |
|------|----|------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|
| | | | | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja |
| 1 | 04 | 1.03.2.10.1.04.01.0000 | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 0,00 | 7.012.427.400,00 | 2.359.907.360,00 | 0,00 | 0,00 | 9.372.334.760,00 |
| 1 | 05 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 0,00 | 13.698.188.050,00 | 561.359.700,00 | 0,00 | 0,00 | 14.259.547.750,00 |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.0000 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0,00 | 9.187.981.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.187.981.500,00 |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00 | 4.510.206.550,00 | 561.359.700,00 | 0,00 | 0,00 | 5.071.566.250,00 |
| 1 | 06 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 0,00 | 6.625.001.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.625.001.242,00 |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.0.00.08.0000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0,00 | 6.625.001.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.625.001.242,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1.319.829.412,00 | 82.177.631.231,00 | 1.289.227.181,00 | 0,00 | 0,00 | 83.466.858.412,00 |
| 2 | 07 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 101.029.412,00 | 6.276.490.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.276.490.018,00 |
| 2 | 07 | 2.07.2.17.0.00.06.0000 | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 101.029.412,00 | 6.276.490.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.276.490.018,00 |
| 2 | 08 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 0,00 | 569.565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569.565.000,00 |
| 2 | 08 | 1.06.2.08.0.00.08.0000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0,00 | 569.565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569.565.000,00 |
| 2 | 09 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 10.000.000,00 | 103.049.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.049.800,00 |
| 2 | 09 | 2.09.3.27.0.00.02.0000 | Dinas Pertanian dan Pangan | 10.000.000,00 | 103.049.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.049.800,00 |
| 2 | 10 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | 0,00 | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000.000,00 |
| 2 | 10 | 1.03.2.10.1.04.01.0000 | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 0,00 | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000.000,00 |
| 2 | 11 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 850.500.000,00 | 12.520.449.931,00 | 207.226.481,00 | 0,00 | 0,00 | 12.727.676.412,00 |
| 2 | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Lingkungan Hidup | 850.500.000,00 | 12.520.449.931,00 | 207.226.481,00 | 0,00 | 0,00 | 12.727.676.412,00 |

| Kode | | | Urusan Pemerintah Daerah | Pendapatan | Belanja | | | | |
|------|----|------------------------|--|----------------|-------------------|----------------|---------------|----------|-------------------|
| | | | | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja |
| 2 | 12 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0,00 | 4.926.368.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.368.630,00 |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0,00 | 4.926.368.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.368.630,00 |
| 2 | 13 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0,00 | 7.313.161.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.313.161.994,00 |
| 2 | 13 | 2.13.2.14.0.00.01.0000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0,00 | 7.313.161.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.313.161.994,00 |
| 2 | 14 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0,00 | 2.050.622.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.622.000,00 |
| 2 | 14 | 2.13.2.14.0.00.01.0000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0,00 | 2.050.622.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.622.000,00 |
| 2 | 15 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 137.500.000,00 | 10.974.191.028,00 | 829.544.400,00 | 0,00 | 0,00 | 11.803.735.428,00 |
| 2 | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Perhubungan | 137.500.000,00 | 10.974.191.028,00 | 829.544.400,00 | 0,00 | 0,00 | 11.803.735.428,00 |
| 2 | 16 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0,00 | 9.315.174.080,00 | 149.983.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.465.157.680,00 |
| 2 | 16 | 2.16.2.20.2.21.04.0000 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 0,00 | 9.315.174.080,00 | 149.983.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.465.157.680,00 |
| 2 | 17 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 0,00 | 577.406.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577.406.400,00 |
| 2 | 17 | 2.07.2.17.0.00.06.0000 | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0,00 | 577.406.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577.406.400,00 |
| 2 | 18 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | 0,00 | 5.045.245.686,00 | 1.142.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.046.388.586,00 |
| 2 | 18 | 2.18.0.00.0.00.13.0000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0,00 | 5.045.245.686,00 | 1.142.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.046.388.586,00 |
| 2 | 19 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 75.000.000,00 | 10.930.994.130,00 | 14.472.300,00 | 0,00 | 0,00 | 10.945.466.430,00 |
| 2 | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 75.000.000,00 | 10.930.994.130,00 | 14.472.300,00 | 0,00 | 0,00 | 10.945.466.430,00 |

| Kode | | | Urusan Pemerintah Daerah | Pendapatan | Belanja | | | | |
|------|----|------------------------|---|------------------|-------------------|----------------|---------------|----------|-------------------|
| | | | | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja |
| 2 | 20 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | 0,00 | 62.321.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.321.500,00 |
| 2 | 20 | 2.16.2.20.2.21.04.0000 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 0,00 | 62.321.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.321.500,00 |
| 2 | 21 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | 0,00 | 88.344.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.344.000,00 |
| 2 | 21 | 2.16.2.20.2.21.04.0000 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 0,00 | 88.344.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.344.000,00 |
| 2 | 22 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 145.800.000,00 | 6.095.080.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.095.080.460,00 |
| 2 | 22 | 2.22.3.26.0.00.03.0000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 145.800.000,00 | 6.095.080.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.095.080.460,00 |
| 2 | 23 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | 0,00 | 4.855.750.374,00 | 59.169.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.914.919.674,00 |
| 2 | 23 | 2.23.2.24.0.00.02.0000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0,00 | 4.855.750.374,00 | 59.169.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.914.919.674,00 |
| 2 | 24 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | 0,00 | 303.416.200,00 | 27.688.200,00 | 0,00 | 0,00 | 331.104.400,00 |
| 2 | 24 | 2.23.2.24.0.00.02.0000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0,00 | 303.416.200,00 | 27.688.200,00 | 0,00 | 0,00 | 331.104.400,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 1.422.400.000,00 | 29.686.940.652,00 | 129.818.800,00 | 0,00 | 0,00 | 29.816.759.452,00 |
| 3 | 25 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 222.400.000,00 | 10.228.836.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.228.836.930,00 |
| 3 | 25 | 3.25.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Perikanan | 222.400.000,00 | 10.228.836.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.228.836.930,00 |
| 3 | 26 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | 0,00 | 912.308.100,00 | 108.790.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.021.098.800,00 |
| 3 | 26 | 2.22.3.26.0.00.03.0000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 912.308.100,00 | 108.790.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.021.098.800,00 |
| 3 | 27 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 0,00 | 12.614.518.116,00 | 13.415.700,00 | 0,00 | 0,00 | 12.627.933.816,00 |
| 3 | 27 | 2.09.3.27.0.00.02.0000 | Dinas Pertanian dan Pangan | 0,00 | 12.614.518.116,00 | 13.415.700,00 | 0,00 | 0,00 | 12.627.933.816,00 |
| 3 | 30 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 0,00 | 5.765.301.406,00 | 7.612.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.772.913.806,00 |
| 3 | 30 | 3.31.3.30.0.00.14.0000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 0,00 | 5.765.301.406,00 | 7.612.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.772.913.806,00 |

| Kode | | | Urusan Pemerintah Daerah | Pendapatan | Belanja | | | | |
|------|----|------------------------|---|--------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja |
| 3 | 31 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 1.200.000.000,00 | 165.976.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.976.100,00 |
| 3 | 31 | 3.31.3.30.0.00.14.0000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 1.200.000.000,00 | 165.976.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.976.100,00 |
| 4 | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | 100.873.000,00 | 68.973.294.704,00 | 183.673.570,00 | 0,00 | 0,00 | 69.156.968.274,00 |
| 4 | 01 | | SEKRETARIAT DAERAH | 100.873.000,00 | 33.270.631.166,00 | 9.456.100,00 | 0,00 | 0,00 | 33.280.087.266,00 |
| 4 | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat Daerah | 100.873.000,00 | 33.270.631.166,00 | 9.456.100,00 | 0,00 | 0,00 | 33.280.087.266,00 |
| 4 | 02 | | SEKRETARIAT DPRD | 0,00 | 35.702.663.538,00 | 174.217.470,00 | 0,00 | 0,00 | 35.876.881.008,00 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat DPRD | 0,00 | 35.702.663.538,00 | 174.217.470,00 | 0,00 | 0,00 | 35.876.881.008,00 |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 707.131.146.495,00 | 27.182.106.658,00 | 0,00 | 600.000.000,00 | 87.502.865.165,00 | 115.284.971.823,00 |
| 5 | 01 | | PERENCANAAN | 0,00 | 6.082.095.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.082.095.482,00 |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.02.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0,00 | 6.082.095.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.082.095.482,00 |
| 5 | 02 | | KEUANGAN | 707.131.146.495,00 | 13.244.167.280,00 | 0,00 | 600.000.000,00 | 87.502.865.165,00 | 101.347.032.445,00 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 707.131.146.495,00 | 13.244.167.280,00 | 0,00 | 600.000.000,00 | 87.502.865.165,00 | 101.347.032.445,00 |
| 5 | 03 | | KEPEGAWAIAN | 0,00 | 5.853.779.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.853.779.796,00 |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0,00 | 5.853.779.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.853.779.796,00 |
| 5 | 04 | | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 0,00 | 1.230.922.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.922.100,00 |
| 5 | 04 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0,00 | 1.230.922.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.922.100,00 |
| 5 | 05 | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 0,00 | 771.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771.142.000,00 |
| 5 | 05 | 5.01.5.05.0.00.02.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0,00 | 771.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771.142.000,00 |

| Kode | | | Urusan Pemerintah Daerah | Pendapatan | Belanja | | | | |
|------|----|------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja |
| 6 | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | 0,00 | 11.378.980.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.378.980.700,00 |
| 6 | 01 | | INSPEKTORAT DAERAH | 0,00 | 11.378.980.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.378.980.700,00 |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | Inspektorat | 0,00 | 11.378.980.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.378.980.700,00 |
| 7 | | | UNSUR KEWILAYAHAN | 70.500.000,00 | 18.157.745.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.157.745.297,00 |
| 7 | 01 | | KECAMATAN | 70.500.000,00 | 18.157.745.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.157.745.297,00 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | Kecamatan Manggar | 18.000.000,00 | 2.804.642.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.804.642.394,00 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | Kecamatan Gantung | 15.000.000,00 | 2.791.348.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.791.348.366,00 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | Kecamatan Kelapa Kampit | 21.000.000,00 | 2.887.688.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.887.688.266,00 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | Kecamatan Simpang Pesak | 6.500.000,00 | 2.296.885.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.296.885.500,00 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | Kecamatan Damar | 10.000.000,00 | 2.451.006.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.451.006.028,00 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | Kecamatan Simpang Renggang | 0,00 | 2.245.618.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.245.618.543,00 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | Kecamatan Dendang | 0,00 | 2.680.556.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.680.556.200,00 |
| 8 | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 0,00 | 6.171.598.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.171.598.374,00 |
| 8 | 01 | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0,00 | 6.171.598.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.171.598.374,00 |
| 8 | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0,00 | 6.171.598.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.171.598.374,00 |
| | | | TOTAL | 759.427.623.936,00 | 693.961.780.497,00 | 34.762.490.447,00 | 600.000.000,00 | 87.502.865.165,00 | 816.827.136.109,00 |

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.

NIP. 197106022006041005

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

KAMARUDIN MUTEN



KABUPATEN BELITONG TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

| PENDAPATAN DAERAH | | | |
|---------------------|--|--------------------|-------------|
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 759.427.623.936,00 | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 138.321.181.936,00 | |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 70.734.939.180,00 | |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 51.995.400.587,00 | |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.578.283.047,00 | |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 10.012.559.122,00 | |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 621.096.442.000,00 | |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 586.671.442.000,00 | |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 34.425.000.000,00 | |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 10.000.000,00 | |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 10.000.000,00 | |
| BELANJA DAERAH | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | |
| Bidang Urusan | : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | |
| Organisasi | : 1.01.4.01.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan | | |
| Unit Organisasi | : 1.01.4.01.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan | | |
| Program | : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | |
| Indikator Hasil | : APK SD APK SMP APK PAUD | | |
| Kegiatan | : 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | |
| Indikator Keluaran | : Skor kemampuan Literasi SD Skor kemampuan Numerasi SD | | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| - | - | | |
| - | - | | |
| - | - | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | |
| Indikator Keluaran | : 0 | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| 5 | BELANJA DAERAH | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | |

| | | | |
|--------------------------|--|-------------------|-------------|
| 5 | BELANJA DAERAH | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.300.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| - | - | | |
| - | - | | |
| - | - | 0,00 | |
| PEMBIAYAAN DAERAH | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 57.399.512.173,00 | |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 57.299.512.173,00 | |
| 6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 100.000.000,00 | |

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
NIP/19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

KAMARUDIN MUTEN



REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Lokasi | Sumber Dana |
|----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|---|-------------|
| | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | Dinas Pendidikan | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | |
| | 1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | APK SD APK SMP APK PAUD | 100 Persen 93 Persen 87 Persen | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Skor kemampuan Literasi SD Skor kemampuan Numerasi SD | 67,05 Persen 58,13 Persen | | | | | | | | |
| 1 | 1.01.02.2.01.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 2 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] | |
| 2 | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | 2 0 | 0,00 | 190.896.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.896.000,00 | Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | |
| 3 | 1.01.02.2.01.0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] | |
| 4 | 1.01.02.2.01.0010 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|-------------------------|
| | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | Lokasi | Sumber Dana |
| | | | | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 8.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik | 100 Persen | | | | | | | |
| 1798 | 8.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 26.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1799 | 8.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 Unit | 28.425.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.425.900,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1800 | 8.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 Unit | 9.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300.000,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1801 | 8.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULAB, S.H.
NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

KAMARUDIN MUTEN



KABUPATEN BELITUNG TIMUR
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2026

| Kode | Uraian | Kelompok Belanja | | | | Jumlah | | | |
|------|----------------|------------------|-------|--|--------------------|------------------|------|------|--------------------|
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | | | | |
| 1 | PELAYANAN UMUM | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 1 | 01 | Pendidikan | 181.534.858.188,00 | 98.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 181.633.708.188,00 |
| 1 | 01 | 1 | 02 | Kesehatan | 160.139.532.543,00 | 2.528.516.750,00 | 0,00 | 0,00 | 162.668.049.293,00 |
| 1 | 01 | 1 | 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 11.484.557.838,00 | 31.803.900,00 | 0,00 | 0,00 | 11.516.361.738,00 |
| 1 | 01 | 1 | 05 | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | 12.641.070.500,00 | 99.461.600,00 | 0,00 | 0,00 | 12.740.532.100,00 |
| 1 | 01 | 1 | 06 | Sosial | 4.115.410.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.115.410.942,00 |
| 1 | 01 | 2 | 07 | Tenaga Kerja | 5.851.122.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.851.122.518,00 |
| 1 | 01 | 2 | 11 | Lingkungan Hidup | 9.277.224.356,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.278.474.356,00 |
| 1 | 01 | 2 | 12 | Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4.926.368.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.368.630,00 |
| 1 | 01 | 2 | 13 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 7.313.161.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.313.161.994,00 |
| 1 | 01 | 2 | 15 | Perhubungan | 5.968.938.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.968.938.348,00 |
| 1 | 01 | 2 | 16 | Komunikasi dan Informatika | 6.982.775.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.982.775.330,00 |
| 1 | 01 | 2 | 18 | Penanaman Modal | 4.896.108.086,00 | 1.142.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.897.250.986,00 |
| 1 | 01 | 2 | 19 | Kepemudaan dan Olahraga | 7.070.755.230,00 | 14.472.300,00 | 0,00 | 0,00 | 7.085.227.530,00 |
| 1 | 01 | 2 | 20 | Statistik | 62.321.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.321.500,00 |
| 1 | 01 | 2 | 22 | Kebudayaan | 5.872.695.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.872.695.760,00 |
| 1 | 01 | 2 | 23 | Perpustakaan | 4.689.187.574,00 | 19.222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.708.409.574,00 |
| 1 | 01 | 2 | 24 | Kearsipan | 303.416.200,00 | 27.688.200,00 | 0,00 | 0,00 | 331.104.400,00 |
| 1 | 01 | 3 | 25 | Kelautan dan Perikanan | 6.010.272.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.010.272.700,00 |
| 1 | 01 | 3 | 27 | Pertanian | 10.052.559.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.052.559.416,00 |

| Kode | | | | Uraian | Kelompok Belanja | | | | Jumlah |
|------|----|---|----|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | |
| 1 | 01 | 3 | 30 | Perdagangan | 5.334.397.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.334.397.506,00 |
| 1 | 01 | 4 | 01 | Sekretariat Daerah | 33.270.631.166,00 | 9.456.100,00 | 0,00 | 0,00 | 33.280.087.266,00 |
| 1 | 01 | 4 | 02 | Sekretariat DPRD | 35.702.663.538,00 | 174.217.470,00 | 0,00 | 0,00 | 35.876.881.008,00 |
| 1 | 01 | 5 | 01 | Perencanaan | 6.082.095.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.082.095.482,00 |
| 1 | 01 | 5 | 02 | Keuangan | 13.244.167.280,00 | 0,00 | 600.000.000,00 | 87.502.865.165,00 | 101.347.032.445,00 |
| 1 | 01 | 5 | 03 | Kepegawaian | 5.853.779.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.853.779.796,00 |
| 1 | 01 | 5 | 04 | Pendidikan dan Pelatihan | 1.230.922.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.922.100,00 |
| 1 | 01 | 5 | 05 | Penelitian dan Pengembangan | 771.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771.142.000,00 |
| 1 | 01 | 6 | 01 | Inspektorat | 11.378.980.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.378.980.700,00 |
| 1 | 01 | 7 | 01 | Kecamatan | 18.157.745.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.157.745.297,00 |
| 1 | 01 | 8 | 01 | Kesatuan Bangsa dan Politik | 6.171.598.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.171.598.374,00 |
| 2 | | | | KETERTIBAN DAN KEAMANAN | | | | | |
| 2 | 03 | 1 | 05 | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | 1.057.117.550,00 | 461.898.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519.015.650,00 |
| 2 | 03 | 1 | 06 | Sosial | 130.670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.670.000,00 |
| 3 | | | | EKONOMI | | | | | |
| 3 | 04 | 1 | 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.048.387.360,00 | 10.171.113.146,00 | 0,00 | 0,00 | 11.219.500.506,00 |
| 3 | 04 | 2 | 07 | Tenaga Kerja | 425.367.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.367.500,00 |
| 3 | 04 | 2 | 09 | Pangan | 103.049.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.049.800,00 |
| 3 | 04 | 2 | 15 | Perhubungan | 5.005.252.680,00 | 829.544.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.834.797.080,00 |
| 3 | 04 | 2 | 16 | Komunikasi dan Informatika | 2.332.398.750,00 | 149.983.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.482.382.350,00 |
| 3 | 04 | 2 | 17 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 577.406.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577.406.400,00 |
| 3 | 04 | 2 | 18 | Penanaman Modal | 149.137.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.137.600,00 |
| 3 | 04 | 2 | 21 | Persandian | 88.344.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.344.000,00 |
| 3 | 04 | 3 | 25 | Kelautan dan Perikanan | 4.218.564.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.218.564.230,00 |

| Kode | | | | Uraian | Kelompok Belanja | | | | Jumlah |
|------|----|---|----|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | |
| 3 | 04 | 3 | 27 | Pertanian | 2.561.958.700,00 | 13.415.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.575.374.400,00 |
| 3 | 04 | 3 | 30 | Perdagangan | 430.903.900,00 | 7.612.400,00 | 0,00 | 0,00 | 438.516.300,00 |
| 3 | 04 | 3 | 31 | Perindustrian | 165.976.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.976.100,00 |
| 4 | | | | PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | |
| 4 | 05 | 1 | 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2.025.000.000,00 | 199.644.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.224.644.000,00 |
| 4 | 05 | 2 | 10 | Pertanahan | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000.000,00 |
| 4 | 05 | 2 | 11 | Lingkungan Hidup | 3.243.225.575,00 | 205.976.481,00 | 0,00 | 0,00 | 3.449.202.056,00 |
| 5 | | | | PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM | | | | | |
| 5 | 06 | 1 | 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 671.887.900,00 | 426.891.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098.779.800,00 |
| 5 | 06 | 1 | 04 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 7.012.427.400,00 | 2.359.907.360,00 | 0,00 | 0,00 | 9.372.334.760,00 |
| 6 | | | | KESEHATAN | | | | | |
| 6 | 07 | 1 | 02 | Kesehatan | 41.286.590.500,00 | 7.908.256.800,00 | 0,00 | 0,00 | 49.194.847.300,00 |
| 6 | 07 | 2 | 14 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2.050.622.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.622.000,00 |
| 7 | | | | PARIWISATA | | | | | |
| 7 | 08 | 3 | 26 | Pariwisata | 912.308.100,00 | 108.790.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.021.098.800,00 |
| 8 | | | | PENDIDIKAN | | | | | |
| 8 | 10 | 1 | 01 | Pendidikan | 24.707.051.860,00 | 8.873.427.340,00 | 0,00 | 0,00 | 33.580.479.200,00 |
| 8 | 10 | 2 | 19 | Kepemudaan dan Olahraga | 3.860.238.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.860.238.900,00 |
| 8 | 10 | 2 | 22 | Kebudayaan | 222.384.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.384.700,00 |
| 8 | 10 | 2 | 23 | Perpustakaan | 166.562.800,00 | 39.947.300,00 | 0,00 | 0,00 | 206.510.100,00 |
| 9 | | | | PERLINDUNGAN SOSIAL | | | | | |
| 9 | 11 | 1 | 06 | Sosial | 2.378.920.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.378.920.300,00 |
| 9 | 11 | 2 | 08 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 569.565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569.565.000,00 |
| | | | | TOTAL | 693.961.780.497,00 | 34.762.490.447,00 | 600.000.000,00 | 87.502.865.165,00 | 816.827.136.109,00 |

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.

NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

KAMARUDIN MUTEN



KABUPATEN BELITONG TIMUR
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2026

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Sub Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) |
|-------------------------|---------------------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A SPM Bidang Pendidikan | | | |
| 1. | Angka Partisipasi Sekolah | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 15.000.000,00 |
| | | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 0,00 |
| | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 193.230.000,00 |
| | | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 49.995.200,00 |
| | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | 1.519.440.000,00 |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 299.037.000,00 |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 80.580.000,00 |
| | | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 14.824.900,00 |
| | | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 0,00 |
| | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 14.744.000,00 |
| | | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 49.942.100,00 |
| | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 505.400,00 |
| | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | 19.860.000,00 |
| | | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 24.920.000,00 |
| | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 190.896.000,00 |
| | | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 401.104.800,00 |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 950.492.000,00 |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 107.324.500,00 |
| | | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 4.764.600,00 |
| | | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 640.000.000,00 |
| | | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 242.772.000,00 |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 704.200.000,00 |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 0,00 |
| | | Total | 5.523.632.500,00 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Sub Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) |
|-------|--|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 42.483.000,00 |
| | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 34.940.000,00 |
| | | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 24.966.500,00 |
| | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 43.968.200,00 |
| | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 15.260.000,00 |
| Total | | | 161.617.700,00 |
| 3. | Kekhususan PAUD | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | 19.120.000,00 |
| | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 130.000.000,00 |
| | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | 163.322.100,00 |
| | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | 47.716.800,00 |
| Total | | | 360.158.900,00 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Sub Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) |
|---|--|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Literasi dan Numerasi | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 28.012.400,00 |
| | | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 30.596.800,00 |
| | | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | 29.678.000,00 |
| | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 449.720.800,00 |
| | | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 24.900.000,00 |
| | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | 0,00 |
| | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 76.320.400,00 |
| | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 66.712.800,00 |
| | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | 2.057.979.000,00 |
| | | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.690.000,00 |
| | | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | 18.952.400,00 |
| | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 566.418.600,00 |
| | | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 24.900.000,00 |
| | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | 339.516.000,00 |
| | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 68.586.400,00 |
| | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 502.400,00 |
| | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | 503.791.700,00 |
| Total | | | 4.293.277.700,00 |
| Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan | | | 10.338.686.800,00 |
| B SPM Bidang Kesehatan | | | |
| 1. | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 271.422.900,00 |
| Total | | | 271.422.900,00 |
| 2. | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 89.828.800,00 |
| Total | | | 89.828.800,00 |
| 3. | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 199.846.600,00 |
| Total | | | 199.846.600,00 |
| 4. | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 561.560.200,00 |
| Total | | | 561.560.200,00 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Sub Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) |
|---|--|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 427.165.000,00 |
| Total | | | 427.165.000,00 |
| 6. | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 410.559.300,00 |
| Total | | | 410.559.300,00 |
| 7. | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 288.467.000,00 |
| Total | | | 288.467.000,00 |
| 8. | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 15.360.000,00 |
| Total | | | 15.360.000,00 |
| 9. | Pelayanan Kesehatan Balita | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 324.213.500,00 |
| Total | | | 324.213.500,00 |
| 10. | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 534.108.250,00 |
| Total | | | 534.108.250,00 |
| 11. | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 41.204.000,00 |
| Total | | | 41.204.000,00 |
| 12. | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 478.284.100,00 |
| Total | | | 478.284.100,00 |
| Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan | | | 3.642.019.650,00 |
| C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | | | |
| 1. | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | 199.644.000,00 |
| | | Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | 0,00 |
| | | Penyediaan Unit pengolahan setempat | 995.800.000,00 |
| | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 0,00 |
| Total | | | 1.195.444.000,00 |
| 2. | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 487.681.800,00 |
| | | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 249.318.000,00 |
| | | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 0,00 |
| | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 250.000.000,00 |
| | | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 111.780.000,00 |
| Total | | | 1.098.779.800,00 |
| Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | | | 2.294.223.800,00 |
| D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | | | |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Sub Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) |
|---|---|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota | Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota | 120.000.000,00 |
| | | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | 105.000.000,00 |
| Total | | | 225.000.000,00 |
| Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | | | 225.000.000,00 |
| E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | |
| 1. | Pelayanan Informasi Rawan Bencana | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | 0,00 |
| | | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | 23.052.550,00 |
| Total | | | 23.052.550,00 |
| 2. | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | 18.751.400,00 |
| | | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | 7.866.000,00 |
| | | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | 566.669.900,00 |
| | | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | 96.467.100,00 |
| | | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | 164.634.800,00 |
| Total | | | 854.389.200,00 |
| 3. | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 35.478.100,00 |
| | | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 149.998.800,00 |
| Total | | | 185.476.900,00 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Sub Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) |
|----|--|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana | 0,00 |
| | | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | 0,00 |
| | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | 0,00 |
| | | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 126.429.200,00 |
| | | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | 0,00 |
| | | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 |
| | | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 |
| | | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | 0,00 |
| | | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | 0,00 |
| | | Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | 0,00 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | 0,00 |
| | | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | 0,00 |
| | | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | 0,00 |
| | | Total | 126.429.200,00 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Sub Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) |
|--|---|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Pelayanan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keteriban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 119.925.000,00 |
| | | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Keteriban Umum | 0,00 |
| | | Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan | 0,00 |
| | | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat | 0,00 |
| | | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja | 0,00 |
| | | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | 0,00 |
| | | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol Pngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional | 0,00 |
| | | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah | 0,00 |
| | | Penyusunan SOP Keteriban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | 0,00 |
| | | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) | 0,00 |
| | | Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 0,00 |
| Total | | | 119.925.000,00 |
| Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketenteraman dan Keteriban Umum | | | 1.309.272.850,00 |
| F SPM Bidang Sosial | | | |
| 1. | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota | Penyediaan Makanan | 0,00 |
| Total | | | 0,00 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Sub Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) |
|---|--|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 0,00 |
| | | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 24.783.200,00 |
| | | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | 0,00 |
| | | Pemberian Layanan Kedaruratan | 0,00 |
| | | Pemberian Layanan Rujukan | 0,00 |
| | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 0,00 |
| | | Penyediaan Alat Bantu | 55.071.000,00 |
| | | Penyediaan Permakanan | 72.015.000,00 |
| | | Penyediaan Sandang | 49.462.800,00 |
| Total | | | 201.332.000,00 |
| Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial | | | 201.332.000,00 |

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

KAMARUDIN MUTEN



KABUPATEN BELITUNG TIMUR
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) |
|------|----|----|---|--------------------|---------------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | |
| 1 | 01 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | |
| 1 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 187.242.432.221,00 | 181.633.708.188,00 |
| 1 | 01 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 40.989.606.100,00 | 33.397.058.600,00 |
| 1 | 01 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | 90.000.000,00 | 89.832.400,00 |
| 1 | 01 | 04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 90.000.000,00 | 58.609.200,00 |
| 1 | 01 | 06 | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA | 35.000.000,00 | 34.979.000,00 |
| 1 | 02 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | |
| 1 | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 169.763.129.204,00 | 162.668.049.293,00 |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 44.789.547.429,00 | 45.797.650.500,00 |
| 1 | 02 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 905.230.500,00 | 2.982.425.400,00 |
| 1 | 02 | 04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 11.322.069,00 | 10.991.600,00 |
| 1 | 02 | 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 349.398.866,00 | 403.779.800,00 |
| 1 | 03 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | |
| 1 | 03 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 13.167.310.485,00 | 11.516.361.738,00 |
| 1 | 03 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 1.600.000.000,00 | 1.598.277.820,00 |
| 1 | 03 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 1.100.000.000,00 | 1.098.779.800,00 |
| 1 | 03 | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 1.200.000.000,00 | 1.195.444.000,00 |
| 1 | 03 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 2.000.000.000,00 | 1.998.342.260,00 |
| 1 | 03 | 08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| 1 | 03 | 09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | 250.000.000,00 | 249.940.100,00 |
| 1 | 03 | 10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 7.000.000.000,00 | 6.996.091.526,00 |
| 1 | 03 | 11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 280.000.000,00 | 176.848.800,00 |
| 1 | 03 | 12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 1.100.000.000,00 | 1.029.200.000,00 |
| 1 | 04 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | |
| 1 | 04 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 268.000.000,00 | 248.820.000,00 |
| 1 | 04 | 03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 101.000.000,00 | 98.000.000,00 |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) |
|------|----|----|---|-------------------|---------------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 04 | 04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | 6.784.000.000,00 | 5.935.736.000,00 |
| 1 | 04 | 05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 2.347.000.000,00 | 3.089.778.760,00 |
| 1 | 05 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | |
| 1 | 05 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 14.795.400.271,00 | 12.740.532.100,00 |
| 1 | 05 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 175.244.000,00 | 175.236.000,00 |
| 1 | 05 | 03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 1.240.248.395,00 | 1.217.350.450,00 |
| 1 | 05 | 04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 126.432.500,00 | 126.429.200,00 |
| 1 | 06 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | |
| 1 | 06 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.852.467.152,00 | 4.115.410.942,00 |
| 1 | 06 | 02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 2.093.974.900,00 | 2.088.945.200,00 |
| 1 | 06 | 04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 235.824.500,00 | 229.977.000,00 |
| 1 | 06 | 05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 60.000.000,00 | 59.998.100,00 |
| 1 | 06 | 06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 145.125.000,00 | 130.670.000,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | |
| 2 | 07 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | |
| 2 | 07 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.557.325.494,00 | 5.851.122.518,00 |
| 2 | 07 | 03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 310.000.000,00 | 293.368.000,00 |
| 2 | 07 | 04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 65.000.000,00 | 59.099.500,00 |
| 2 | 07 | 05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 339.390.000,00 | 72.900.000,00 |
| 2 | 08 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | |
| 2 | 08 | 02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 14.577.100,00 | 7.530.000,00 |
| 2 | 08 | 03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 196.514.200,00 | 197.380.900,00 |
| 2 | 08 | 04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 48.725.600,00 | 29.355.000,00 |
| 2 | 08 | 06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 46.227.000,00 | 25.680.000,00 |
| 2 | 08 | 07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 309.175.800,00 | 309.619.100,00 |
| 2 | 09 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | |
| 2 | 09 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 213.993.600,00 | 73.200.700,00 |
| 2 | 09 | 04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 28.273.600,00 | 3.349.100,00 |
| 2 | 09 | 05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 60.000.000,00 | 26.500.000,00 |
| 2 | 10 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) |
|------|----|----|---|------------------|---------------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 10 | 10 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | 200.000.000,00 | 170.000.000,00 |
| 2 | 11 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | |
| 2 | 11 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.763.250.151,00 | 9.278.474.356,00 |
| 2 | 11 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | 70.534.500,00 | 59.976.400,00 |
| 2 | 11 | 03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 541.276.275,00 | 580.394.256,00 |
| 2 | 11 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 8.863.200,00 | 8.857.500,00 |
| 2 | 11 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 26.395.800,00 | 8.084.000,00 |
| 2 | 11 | 07 | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 |
| 2 | 11 | 09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 157.840.500,00 | 130.690.200,00 |
| 2 | 11 | 10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 4.185.000,00 | 4.185.000,00 |
| 2 | 11 | 11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 2.739.168.800,00 | 2.587.014.700,00 |
| 2 | 12 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | |
| 2 | 12 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.138.974.272,00 | 4.838.033.930,00 |
| 2 | 12 | 02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 10.000.000,00 | 39.999.700,00 |
| 2 | 12 | 03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 10.000.000,00 | 34.999.400,00 |
| 2 | 12 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 10.000.000,00 | 13.335.600,00 |
| 2 | 13 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | |
| 2 | 13 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.504.909.277,00 | 5.736.162.194,00 |
| 2 | 13 | 04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 1.680.000.000,00 | 1.350.000.000,00 |
| 2 | 13 | 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 77.000.000,00 | 226.999.800,00 |
| 2 | 14 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | |
| 2 | 14 | 02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 175.417.000,00 | 175.417.000,00 |
| 2 | 14 | 03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 1.188.788.000,00 | 1.120.205.000,00 |
| 2 | 14 | 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 755.000.000,00 | 755.000.000,00 |
| 2 | 15 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | |
| 2 | 15 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.558.138.496,00 | 5.968.938.348,00 |
| 2 | 15 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 6.013.092.700,00 | 5.433.532.580,00 |
| 2 | 15 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 433.327.200,00 | 401.264.500,00 |

| KODE | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|------|----|--|---|---------------------|------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 2 | 16 | | | | |
| | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | |
| 2 | 16 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7.611.190.515,00 | 6.982.775.330,00 |
| 2 | 16 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 297.757.300,00 | 354.099.500,00 |
| 2 | 16 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 2.089.171.238,00 | 2.128.282.850,00 |
| 2 | 17 | | | | |
| | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | |
| 2 | 17 | 05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 |
| 2 | 17 | 08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 502.406.400,00 | 502.406.400,00 |
| 2 | 18 | | | | |
| | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | |
| 2 | 18 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.694.097.900,00 | 4.897.250.986,00 |
| 2 | 18 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 19.891.000,00 | 19.880.200,00 |
| 2 | 18 | 03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 41.075.000,00 | 43.200.000,00 |
| 2 | 18 | 04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 45.069.800,00 | 42.578.800,00 |
| 2 | 18 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 38.979.000,00 | 38.881.900,00 |
| 2 | 18 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 4.829.000,00 | 4.596.700,00 |
| 2 | 19 | | | | |
| | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | |
| 2 | 19 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.024.645.078,00 | 7.085.227.530,00 |
| 2 | 19 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 616.888.100,00 | 453.699.500,00 |
| 2 | 19 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 5.287.976.764,00 | 3.244.815.300,00 |
| 2 | 19 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | 202.090.700,00 | 161.724.100,00 |
| 2 | 20 | | | | |
| | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | |
| 2 | 20 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 68.738.500,00 | 62.321.500,00 |
| 2 | 21 | | | | |
| | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | |
| 2 | 21 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 92.793.000,00 | 88.344.000,00 |
| 2 | 22 | | | | |
| | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | |
| 2 | 22 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 14.082.663.926,00 | 5.872.695.760,00 |
| 2 | 22 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 229.000.000,00 | 116.770.100,00 |
| 2 | 22 | 05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 126.000.000,00 | 67.538.600,00 |
| 2 | 22 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | 45.000.000,00 | 38.076.000,00 |
| 2 | 23 | | | | |
| | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | |
| 2 | 23 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0,00 | 4.708.409.574,00 |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) |
|------|----|----|---|-------------------|---------------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 23 | 02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 188.127.000,00 | 195.911.300,00 |
| 2 | 23 | 03 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | 15.000.000,00 | 10.598.800,00 |
| 2 | 24 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | |
| 2 | 24 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 100.000.000,00 | 250.993.400,00 |
| 2 | 24 | 03 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | 100.000.000,00 | 80.111.000,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | |
| 3 | 25 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | |
| 3 | 25 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7.650.883.637,00 | 6.010.272.700,00 |
| 3 | 25 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 2.055.000.000,00 | 2.390.299.300,00 |
| 3 | 25 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 1.037.372.000,00 | 1.167.888.180,00 |
| 3 | 25 | 05 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 55.000.000,00 | 35.868.800,00 |
| 3 | 25 | 06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 583.100.000,00 | 624.507.950,00 |
| 3 | 26 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | |
| 3 | 26 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 434.532.600,00 | 534.931.800,00 |
| 3 | 26 | 03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 375.058.188,00 | 357.344.000,00 |
| 3 | 26 | 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 150.540.600,00 | 128.823.000,00 |
| 3 | 27 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | |
| 3 | 27 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 11.394.226.218,00 | 10.052.559.416,00 |
| 3 | 27 | 02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 1.883.152.056,00 | 1.883.020.100,00 |
| 3 | 27 | 03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 403.424.000,00 | 403.424.000,00 |
| 3 | 27 | 04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 232.461.700,00 | 232.442.400,00 |
| 3 | 27 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | 49.511.800,00 | 47.955.000,00 |
| 3 | 27 | 07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 172.710.000,00 | 8.532.900,00 |
| 3 | 30 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | |
| 3 | 30 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.212.646.640,00 | 5.334.397.506,00 |
| 3 | 30 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 384.671.900,00 | 375.045.000,00 |
| 3 | 30 | 04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 25.039.000,00 | 12.730.800,00 |
| 3 | 30 | 06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 116.963.100,00 | 50.740.500,00 |
| 3 | 31 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | |
| 3 | 31 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 68.735.100,00 | 165.976.100,00 |
| 4 | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) |
|------|----|----|--|-------------------|---------------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 01 | | SEKRETARIAT DAERAH | | |
| 4 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 27.918.153.884,00 | 25.282.085.366,00 |
| 4 | 01 | 02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 6.886.654.100,00 | 7.549.401.200,00 |
| 4 | 01 | 03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 532.230.965,00 | 448.600.700,00 |
| 4 | 02 | | SEKRETARIAT DPRD | | |
| 4 | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 22.711.180.000,00 | 22.171.453.808,00 |
| 4 | 02 | 02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 13.794.278.750,00 | 13.705.427.200,00 |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | |
| 5 | 01 | | PERENCANAAN | | |
| 5 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.336.573.397,00 | 5.882.201.382,00 |
| 5 | 01 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 140.919.100,00 | 128.463.100,00 |
| 5 | 01 | 03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 63.507.100,00 | 71.431.000,00 |
| 5 | 02 | | KEUANGAN | | |
| 5 | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 10.939.500.000,00 | 11.045.427.180,00 |
| 5 | 02 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 98.888.000.000,00 | 89.006.551.565,00 |
| 5 | 02 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 415.000.000,00 | 302.704.500,00 |
| 5 | 02 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 1.244.664.500,00 | 992.349.200,00 |
| 5 | 03 | | KEPEGAWAIAN | | |
| 5 | 03 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.934.287.436,00 | 5.164.872.496,00 |
| 5 | 03 | 02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 905.397.513,00 | 688.907.300,00 |
| 5 | 04 | | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | |
| 5 | 04 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 935.143.700,00 | 1.230.922.100,00 |
| 5 | 05 | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | |
| 5 | 05 | 02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 15.000.000,00 | 12.258.000,00 |
| 5 | 05 | 03 | PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | 456.629.400,00 | 758.884.000,00 |
| 6 | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | |
| 6 | 01 | | INSPEKTORAT DAERAH | | |
| 6 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 12.269.491.796,00 | 10.634.290.570,00 |
| 6 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 847.890.941,00 | 526.033.000,00 |
| 6 | 01 | 03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 408.581.000,00 | 218.657.130,00 |
| 7 | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | |
| 7 | 01 | | KECAMATAN | | |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) |
|------|----|----|--|-------------------|---------------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 |
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 19.936.659.246,00 | 17.333.259.897,00 |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 122.879.800,00 | 94.456.900,00 |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 391.322.400,00 | 610.555.200,00 |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 42.045.900,00 | 38.703.800,00 |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 40.378.600,00 | 28.075.500,00 |
| 7 | 01 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 60.757.000,00 | 52.694.000,00 |
| 8 | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | |
| 8 | 01 | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | |
| 8 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.482.482.746,00 | 2.801.580.574,00 |
| 8 | 01 | 02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 985.145.300,00 | 862.262.800,00 |
| 8 | 01 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 1.366.011.900,00 | 1.292.994.800,00 |
| 8 | 01 | 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 166.065.500,00 | 68.381.600,00 |
| 8 | 01 | 05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | 130.895.400,00 | 69.204.800,00 |
| 8 | 01 | 06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 1.370.096.503,00 | 1.077.173.800,00 |

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 AMRULLAH, S.H.
 NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

KAMARUDIN MUTEN



KABUPATEN BELITUNG TIMUR
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD (Rp) | PPAS (Rp) | Rancangan APBD (Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1.01.4.01.0.00.01.0000 | | | | | | Dinas Pendidikan | 228.286.995.421,00 | 228.286.995.421,00 | 215.214.187.388,00 |
| 1.01.4.01.0.00.01.0000 | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 228.286.995.421,00 | 228.286.995.421,00 | 215.214.187.388,00 |
| 1.01.4.01.0.00.01.0000 | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 228.286.995.421,00 | 228.286.995.421,00 | 215.214.187.388,00 |
| 1.01.4.01.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 187.117.932.221,00 | 187.104.685.141,00 | 181.633.708.188,00 |
| 1.01.4.01.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.500.000,00 | 5.499.600,00 | 4.309.600,00 |
| 1.01.4.01.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 968.400,00 |
| 1.01.4.01.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.500.000,00 | 1.499.800,00 | 1.195.600,00 |
| 1.01.4.01.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.000.000,00 | 999.800,00 | 828.400,00 |
| 1.01.4.01.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.317.200,00 |
| 1.01.4.01.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 184.916.922.221,00 | 184.913.373.041,00 | 180.089.171.388,00 |
| 1.01.4.01.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 184.916.922.221,00 | 184.913.373.041,00 | 180.089.171.388,00 |
| 1.01.4.01.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 85.000.000,00 | 84.817.000,00 | 84.817.000,00 |
| 1.01.4.01.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.03 | 0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 35.000.000,00 | 34.997.000,00 | 34.997.000,00 |
| 1.01.4.01.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 50.000.000,00 | 49.820.000,00 | 49.820.000,00 |
| 1.01.4.01.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 20.500.000,00 | 20.350.000,00 | 20.350.000,00 |
| 1.01.4.01.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 5.500.000,00 | 5.350.000,00 | 5.350.000,00 |
| 1.01.4.01.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 1.01.4.01.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 805.000.000,00 | 804.993.100,00 | 439.795.500,00 |
| 1.01.4.01.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 20.000.000,00 | 19.999.500,00 | 19.999.500,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD (Rp) | PPAS (Rp) | Rancangan APBD (Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 113.375.500,00 | 113.286.100,00 | 95.586.100,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 99.778.000,00 | 99.764.900,00 | 85.906.200,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 311.273.500,00 | 311.272.100,00 | 253.474.800,00 |
| TOTAL | | | | | | | 871.549.109.201,00 | 896.632.391.952,00 | 816.764.814.609,00 |

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.

NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

KAMARUDIN MUTEN



KABUPATEN BELITUNG TIMUR
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM
PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | | | | Jumlah |
|----|--|---|--|--|---|-------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | |
| 1 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan, serta Kesehatan | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 72.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.900.000,00 |
| 2 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 59.099.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.099.500,00 |
| 3 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Meningkatkan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Budaya | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 293.368.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.368.000,00 |
| 4 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Meningkatkan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Budaya | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 502.406.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502.406.400,00 |
| 5 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya, dan berbudaya | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Dinas Perhubungan | 401.264.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.264.500,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | | | | Jumlah |
|----|--|---|---|----------------------------|---|----------------|---------------|----------|------------------|
| | | | | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | |
| 6 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya, dan berbudaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Perhubungan | 5.950.624.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950.624.148,00 |
| 7 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya, dan berbudaya | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Dinas Perhubungan | 4.590.746.380,00 | 829.544.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.420.290.780,00 |
| 8 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Dinas Perikanan | 35.868.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.868.800,00 |
| 9 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Dinas Perikanan | 1.167.888.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167.888.180,00 |
| 10 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Dinas Perikanan | 2.378.843.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.378.843.300,00 |
| 11 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Dinas Perikanan | 624.507.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.507.950,00 |
| 12 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Dinas Pertanian dan Pangan | 3.349.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.349.100,00 |
| 13 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Dinas Pertanian dan Pangan | 26.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | | | | Jumlah |
|----|---|---|---|----------------------------|---|---------------|---------------|----------|------------------|
| | | | | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | |
| 14 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Dinas Pertanian dan Pangan | 47.955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.955.000,00 |
| 15 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Dinas Pertanian dan Pangan | 221.526.700,00 | 10.915.700,00 | 0,00 | 0,00 | 232.442.400,00 |
| 16 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Dinas Pertanian dan Pangan | 73.200.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.200.700,00 |
| 17 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Pertanian dan Pangan | 19.994.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.994.900,00 |
| 18 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Dinas Pertanian dan Pangan | 400.924.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 403.424.000,00 |
| 19 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Dinas Pertanian dan Pangan | 1.883.020.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.883.020.100,00 |
| 20 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Dinas Pertanian dan Pangan | 8.532.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.532.900,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | | | | Jumlah |
|----|--|---|---|---|---|-------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | |
| 21 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 42.578.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.578.800,00 |
| 22 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 4.596.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.596.700,00 |
| 23 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 19.880.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.880.200,00 |
| 24 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 38.881.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.881.900,00 |
| 25 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 43.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.200.000,00 |
| 26 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 375.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.045.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | | | | Jumlah |
|----|--|---|---|---|---|--------------|---------------|----------|------------------|
| | | | | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | |
| 29 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 5.334.397.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.334.397.506,00 |
| 30 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 165.976.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.976.100,00 |
| 31 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 12.730.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.730.800,00 |
| 32 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 43.128.100,00 | 7.612.400,00 | 0,00 | 0,00 | 50.740.500,00 |
| 33 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Meningkatkan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Budaya | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 59.998.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.998.100,00 |
| 34 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya, dan berbudaya | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1.965.596.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.965.596.600,00 |
| 35 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 8.173.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.173.200,00 |
| 36 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan, serta Kesehatan | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 3.102.278.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.102.278.100,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | | | | Jumlah |
|----|--|---|---|--------------------|---|------------------|---------------|----------|--------------------|
| | | | | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | |
| 37 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Dinas Kesehatan | 140.624.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.624.800,00 |
| 38 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Dinas Kesehatan | 33.307.091.300,00 | 1.331.081.400,00 | 0,00 | 0,00 | 34.638.172.700,00 |
| 39 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Dinas Kesehatan | 1.181.705.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.181.705.400,00 |
| 40 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Kesehatan | 107.992.753.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.992.753.361,00 |
| 41 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Dinas Kesehatan | 10.991.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.991.600,00 |
| 42 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Dinas Pendidikan | 3.600.000,00 | 295.437.000,00 | 0,00 | 0,00 | 299.037.000,00 |
| 43 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | RSUD Muhammad Zein | 241.908.000,00 | 6.575.175.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.817.083.400,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | | | | Jumlah |
|----|--|---|---|-----------------------|---|----------------|---------------|----------|------------------|
| | | | | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | |
| 44 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | RSUD Muhammad Zein | 3.595.069.600,00 | 241.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.836.949.600,00 |
| 45 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | UPT Puskesmas Dendang | 7.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300.000,00 |
| 46 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | UPT Puskesmas Dendang | 470.037.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.037.000,00 |
| 47 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | UPT Puskesmas Dendang | 860.111.656,00 | 64.377.000,00 | 0,00 | 0,00 | 924.488.656,00 |
| 48 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | UPT Puskesmas Gantung | 17.165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.165.000,00 |
| 49 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | UPT Puskesmas Gantung | 627.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627.290.000,00 |
| 50 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | UPT Puskesmas Gantung | 3.145.488.978,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.245.488.978,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | | | | Jumlah |
|----|--|---|---|-----------------------------|---|----------------|---------------|----------|------------------|
| | | | | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | |
| 51 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | UPT Puskesmas Kelapa Kampit | 44.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.290.000,00 |
| 52 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | UPT Puskesmas Kelapa Kampit | 588.521.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588.521.000,00 |
| 53 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | UPT Puskesmas Kelapa Kampit | 2.197.383.045,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.397.383.045,00 |
| 54 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | UPT Puskesmas Manggar | 704.023.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704.023.000,00 |
| 55 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | UPT Puskesmas Manggar | 2.545.344.250,00 | 246.175.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.791.520.000,00 |
| 56 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | UPT Puskesmas Mengkubang | 19.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.170.000,00 |
| 57 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | UPT Puskesmas Mengkubang | 724.415.400,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 726.415.400,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | | | | Jumlah |
|----|--|---|---|-----------------------------|---|---------------|---------------|----------|------------------|
| | | | | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | |
| 58 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | UPT Puskesmas Mengkubang | 1.444.335.553,00 | 92.675.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.537.010.853,00 |
| 59 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | UPT Puskesmas Renggiang | 9.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.720.000,00 |
| 60 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | UPT Puskesmas Renggiang | 482.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.230.000,00 |
| 61 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | UPT Puskesmas Renggiang | 1.094.929.400,00 | 53.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.148.329.400,00 |
| 62 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | UPT Puskesmas Simpang Pesak | 22.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.230.000,00 |
| 63 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | UPT Puskesmas Simpang Pesak | 495.802.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.802.000,00 |
| 64 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | UPT Puskesmas Simpang Pesak | 1.053.577.000,00 | 61.766.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115.343.700,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | | | | Jumlah |
|----|--|---|---|---|---|----------------|---------------|----------|------------------|
| | | | | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | |
| 65 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Budaya | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 28.429.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.429.100,00 |
| 66 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Budaya | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 453.699.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.699.500,00 |
| 67 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Budaya | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 161.724.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.724.100,00 |
| 68 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya, dan berbudaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Pendidikan | 5.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.350.000,00 |
| 69 | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Meningkatkan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Budaya | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 755.452.350,00 | 461.898.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.217.350.450,00 |
| 70 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 128.463.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.463.100,00 |
| 71 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 28.999.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.999.650,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | | | | Jumlah |
|----|--|--|---|---|---|-------|---------------|----------|------------------|
| | | | | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | |
| 72 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 354.099.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.099.500,00 |
| 73 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 6.982.775.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.982.775.330,00 |
| 74 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 88.344.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.344.000,00 |
| 75 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 62.321.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.321.500,00 |
| 76 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 4.136.002.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.136.002.886,00 |
| 77 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Inspektorat | 333.645.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.645.100,00 |
| 78 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Inspektorat | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000.000,00 |
| 79 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kecamatan Simpang Pesak | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | | | | Jumlah |
|----|--|--|---|-----------------------------|---|--------------|---------------|----------|-------------------|
| | | | | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | |
| 80 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Simpang Pesak | 2.095.935.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.095.935.900,00 |
| 81 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kecamatan Simpang Pesak | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 |
| 82 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kecamatan Simpang Pesak | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 83 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kecamatan Simpang Renggiang | 172.371.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.371.600,00 |
| 84 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Simpang Renggiang | 1.887.336.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.887.336.743,00 |
| 85 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Sekretariat Daerah | 7.549.401.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.549.401.200,00 |
| 86 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Sekretariat Daerah | 23.618.901.066,00 | 9.456.100,00 | 0,00 | 0,00 | 23.628.357.166,00 |
| 87 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Sekretariat Daerah | 394.809.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.809.600,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | | | | Jumlah |
|--------------|--|---|---|--|---|--------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| | | | | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | |
| 88 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 688.907.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688.907.300,00 |
| 89 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1.230.922.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.922.100,00 |
| 90 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya, dan berbudaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Kelapa Kampit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 244.258.240.632,00 | 10.585.895.250,00 | 0,00 | 0,00 | 254.844.135.882,00 |

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Lampiran X : Peraturan Daerah
 Nomor : 8 Tahun 2025
 Tanggal : 31 Desember 2025

KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

| GOLONGAN RUANG | ESELON | | | | | TENAGA FUNGSIONAL | | | STAFF | JUMLAH |
|----------------|--------|-----------|------------|------------|---|-------------------|------------|------------|------------|--------------|
| | I | II | III | IV | V | PENDIDIKAN | KESEHATAN | LAINNYA | | |
| Golongan IV/e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Golongan IV/d | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Golongan IV/c | - | 18 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| Golongan IV/b | - | 5 | 29 | - | - | 55 | 8 | 5 | 2 | 104 |
| Golongan IV/a | - | - | 66 | 2 | - | 59 | 7 | 6 | 1 | 141 |
| JUMLAH | - | 24 | 95 | 2 | - | 116 | 17 | 12 | 5 | 271 |
| Golongan III/d | - | - | 28 | 67 | - | 356 | 135 | 115 | 19 | 720 |
| Golongan III/c | - | - | 1 | 46 | - | 191 | 96 | 41 | 33 | 408 |
| Golongan III/b | - | - | - | 13 | - | 268 | 100 | 45 | 128 | 554 |
| Golongan III/a | - | - | - | 2 | - | 15 | 8 | 53 | 161 | 239 |
| JUMLAH | - | - | 29 | 128 | - | 830 | 339 | 254 | 341 | 1.921 |
| Golongan II/d | - | - | - | - | - | 6 | 88 | 12 | 28 | 134 |
| Golongan II/c | - | - | - | - | - | 4 | 50 | 13 | 127 | 194 |
| Golongan II/b | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | 8 |
| Golongan II/a | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| JUMLAH | - | - | - | - | - | 11 | 138 | 26 | 163 | 338 |
| Golongan I/d | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Golongan I/c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Golongan I/b | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Golongan I/a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| TOTAL | - | 24 | 124 | 130 | - | 957 | 494 | 292 | 511 | 2.532 |

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.

NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Lampiran XI : Rancangan Peraturan Daerah

Nomor : 8 Tahun 2025

Tanggal : 31 Desember 2025

**KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

| KODE | URAIAN | APBD (Rp) |
|--------------|--------|-----------|
| NIHIL | | |
| | | |

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
NIP. 197106022006041005

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Lampiran XII : Peraturan Daerah

Nomor : 8 Tahun 2025

Tanggal : 31 Desember 2025

KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2026

| KODE | URAIAN | APBD (Rp) |
|--------------|--------|-----------|
| NIHIL | | |
| | | |

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.

NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Lampiran XIII : Peraturan Daerah

Nomor : 8 Tahun 2025

Tanggal : 31 Desember 2025

KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2026

| NO | Nama Aset | Jenis Aset | Saldo pada akhir tahun T-2 | Perkiraan Penambahan tahun T-1 | Perkiraan Pengurangan tahun T-1 | Perkiraan saldo pada akhir tahun T-1 |
|----------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4+5+6 |
| 1 | Aset Tetap | | 4.478.628.348.815,79 | 124.150.399.263,06 | (4.546.660.573,79) | 4.747.575.369.273,51 |
| | | Tanah | 301.630.431.280,85 | | (9.000.000,00) | 301.621.431.280,85 |
| | | Peralatan dan Mesin | 489.558.814.974,79 | 22.092.007.916,82 | (4.015.475.060,08) | 507.635.347.831,53 |
| | | Gedung dan Bangunan | 769.446.315.855,91 | 24.305.867.026,53 | (79.781.513,71) | 793.672.401.368,73 |
| | | Jalan, Jaringan dan Irigasi | 1.357.268.125.861,60 | 76.065.398.219,71 | (21.448.000,00) | 1.433.312.076.081,31 |
| | | Aset Tetap Lainnya | 27.508.738.722,39 | 1.577.986.600,00 | - | 29.086.725.322,39 |
| | | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 8.498.517.987,00 | 109.139.500 | (420.956.000,00) | 8.186.701.487,00 |
| | | Akumulasi Penyusutan | 1.524.717.404.133,25 | | | 1.674.060.685.901,70 |
| | | | | | | |
| 2 | Aset Lainnya | | 10.045.275.465,49 | 2.374.164.610,08 | (37.255.000,00) | 12.382.185.075,57 |
| | | Kemitraan Dengan Pihak Ketiga | | | | |
| | | Aset Tidak Berwujud | 5.244.263.207,00 | 76.155.000,00 | (24.655.000,00) | 5.295.763.207,00 |
| | | Aset Lain-Lain | 4.801.012.258,49 | 2.298.009.610,08 | (12.600.000,00) | 7.086.421.868,57 |
| | | | | | | |

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRUDLAH, S.H.

NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

KAMARUDIN MUTEN